

RESTRUKTURISASI SISTEM DAN TATA KELOLA WISATA MELALUI PENDEKATAN DESA WISATA DAN COMMUNITY BASED TOURISM KABUPATEN BANTUL

Dani Fikri Setiawan¹, Defia Ifsantin Maula², Tiya Nuryani³, Asri Dwi Ariyani^{4*},
Meutia Layli⁵

^{1,4,5}Program Studi Akuntansi, Universitas Alma Ata, Indonesia

^{2,3}Program Studi Manajemen, Universitas Alma Ata, Indonesia

asriariyani@almaata.ac.id⁴

ABSTRAK

Abstrak: Berbagai potensi wisata dan kearifan lokal sekitar Unit Wisata Banjaran, unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Guwosari Maju Sejahtera Kalurahan Guwosari, Pajangan, Bantul, belum diberdayakan secara optimal, kesadaran dan koordinasi masyarakat dengan BUMDes belum terbentuk secara utuh dan baik, operasional berjalan tanpa peninjauan optimal dari BUMDes. Solusi implementatif pendampingan restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata melalui *Focus Group Discussion* (FGD) ditawarkan guna meningkatkan pemahaman bagaimana potensi wisata dan kearifan lokal dapat diberdayakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat serta bagaimana sinergisme kolaborasi antar pihak seharusnya dijalankan. Secara bersamaan pedoman restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata dirumuskan sebagai panduan masyarakat dalam revitalisasi Unit Wisata Banjaran. Peserta pendampingan berjumlah 12 orang terdiri dari pengelola BUMDes, kepala dukuh, serta warga pengelola terdahulu dan berjalan. Hasil pendampingan diperoleh rumusan rekomendasi restrukturisasi melalui pendekatan desa wisata dan *Community Based Tourism* (CBT) yang termuat dalam buku "Restrukturisasi Sistem dan Tata Kelola Unit Wisata Banjaran", dimana hampir 99% peserta pendampingan mengungkapkan persetujuan atas berbagai rekomendasi yang tercantum.

Kata Kunci: sistem dan tata kelola wisata; community based tourism (CBT); desa wisata.

Abstract: Various tourism potentials and local wisdom around the Banjaran Tourism Unit, a business unit of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Guwosari Maju Sejahtera Kalurahan Guwosari, Pajangan, Bantul, have not been optimally empowered, community awareness and coordination with BUMDes have not been fully and well formed, operations are running without optimal review from BUMDes. Implementative solutions to assist the restructuring of tourism systems and governance through *Focus Group Discussions* (FGDs) are offered to increase understanding of how tourism potential and local wisdom can be empowered so as to provide benefits to the community and how collaborative synergism between parties should be carried out. Simultaneously, guidelines for restructuring the tourism system and governance were formulated as a community guide in revitalizing the Banjaran Tourism Unit. Assistance participants totaled 12 people consisting of BUMDes managers, dukuh heads, and residents of previous and current managers. The results of the assistance obtained the formulation of restructuring recommendations through the approach of village tourism and *Community Based Tourism* (CBT) contained in the book "Restructuring the System and Governance of the Banjaran Tourism Unit", where almost 99% of the mentoring participants expressed approval of the various recommendations listed.

Keywords: tourism system and governance; community based tourism (CBT); tourism village.



Article History:

Received: 26-02-2023

Revised : 20-03-2023

Accepted: 21-03-2023

Online : 08-04-2023



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memiliki kedaulatan melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pemerintahannya (Habibi, 2022). Salah satu upaya desa dalam mewujudkan pemberdayaan desa yaitu dengan mendirikan dan menetapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengelola aset, pemberi jasa pelayanan kepada masyarakat atau penyelenggara berbagai usaha lainnya tidak terkecuali pemberdayaan masyarakat melalui unit usaha pariwisata desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Istiyanti, 2020). Indah nya panorama alam dan keramahan warga yang dimiliki desa, didukung dengan perbaikan akses infrastruktur yang terus berjalan dan membaik mampu meningkatkan optimisme pengembangan pariwisata desa berbasis ekonomi warga melalui BUMDes (Rozaki & Rohaya, 2019). Desa wisata menjadi salah satu bentuk pengembangan pariwisata desa berbasis ekonomi warga yang sedang berkembang dan menjadi tren di banyak desa, karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta kualitas sumber daya manusia sehingga lebih aktif dan peduli terhadap lingkungan sekitar (Ristiana & Yusuf, 2020). Namun demikian, pada temuan lain Wahyuni (2018) menyampaikan bahwa program pengembangan desa melalui desa wisata belum dipastikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya partisipasi langsung warga dalam pengelolaan potensi wisata yang ada, sehingga peluang-peluang yang dimiliki justru digunakan oleh pihak luar desa yang memiliki pengetahuan dan strategi yang lebih tepat. Kurangnya keterlibatan masyarakat sekitar desa wisata dalam perencanaan dan implementasi pengembangan desa mengakibatkan kesadaran, kepedulian, dan rasa memiliki masyarakat rendah dan menjadi pelaku wisata yang pasif. Rendahnya keterlibatan masyarakat sekitar dalam pengembangan desa juga menimbulkan kendala dalam pemberdayaan masyarakat, hal ini juga dapat mengakibatkan potensi wisata tidak terkelola secara optimal dan tata kelola desa wisata tidak berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuannya (Admaja et al., 2020; Habibi, 2022; Ulum & Dewi, 2021; Wahyuni, 2018).

Unit Wisata Banjaran sebagai salah satu unit usaha BUMDes Guwosari Maju Sejahtera Kalurahan Guwosari, Kapanewonan Pajangan, Kabupaten Bantul yang terletak pada Kawasan Banjaran dengan lokasi geografis pada tiga padukuhan yakni Watugedug, Kentolan Lor, dan Kembang Putih memiliki berbagai potensi wisata di antaranya di bidang kerajinan kayu, kesenian dan budaya, alam, serta potensi kuliner dan industri rumahan serta kearifan lokal yang masih terjaga. Sebagai unit wisata yang masih terbilang baru pada akhir tahun 2020, masalah yang dihadapi oleh mitra kegiatan berdasarkan data observasi awal antara lain: (1) sistem dan tata kelola wisata yang dirumuskan oleh BUMDes Guwosari Maju Sejahtera belum terbentuk secara utuh dan baik; (2) berbagai potensi wisata dan kearifan lokal yang dimiliki belum diberdayakan secara optimal; (3) operasional

hanya mengandalkan Warung Banjaran yang terletak di titik Unit Wisata Banjaran serta belum memiliki produk unggulan sebagai branding wisata; (4) kesadaran masyarakat belum terbentuk secara utuh dan baik; dan (5) operasional usaha berjalan tanpa peninjauan dan koordinasi secara berkala dari pihak pengelola secara optimal.

Masyarakat yang seharusnya menjadi pelaku utama dan menjadi bagian yang tidak dapat ditinggalkan dalam berbagai tahapan pengelolaan Unit Wisata Banjaran belum terbentuk koordinasi yang baik dengan pihak pengelola (BUMDes). Beberapa rencana pengembangan Unit Wisata Banjaran hanya dibahas di tingkat pemerintahan, tidak secara merata disosialisasikan kepada warga setempat. Pengembangan wisata yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sudah sepatutnya menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama baik sebagai subyek maupun obyek dalam pembangunan desa wisata (Ignasius & Susilowati, 2020). Tidak optimalnya peran masyarakat dalam proses pengembangan desa sudah menjadi permasalahan yang umum terjadi, sehingga masyarakat tidak hanya merasa kurang bangga tetapi masyarakat juga tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana seharusnya (Herdiana, 2019). Dalam hal ini, berakibat pada Unit Wisata Banjaran yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Selain itu, fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki Unit Wisata Banjaran menjadi tidak terawat dengan baik. Oleh karena itu, program pendampingan restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata perlu dilakukan sebagai solusi implementatif yang ditawarkan oleh tim pengabdian kepada Unit Wisata Banjaran agar potensi wisata dan kearifan lokal yang dimiliki Kawasan Banjaran dapat dimanfaatkan secara optimal. Program pendampingan diyakini dapat menjadi tahap awal untuk membentuk iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya mitra sekaligus contoh sehingga dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai bagaimana yang seharusnya dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan wisata sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan ekonomi, pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap sosial dan budaya masyarakat (Rachman et al., 2019; Utami et al., 2021). Selain itu, melalui restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata pada Unit Wisata Banjaran dapat mendorong terciptanya aksesibilitas, amenities, dan atraksi wisata yang lebih baik sehingga dapat memuaskan wisatawan (Mulyani et al., 2021).

Melalui program restrukturisasi sistem dan tata kelola juga diharapkan dapat terbentuk kontribusi pengelola (BUMDes) serta keterlibatan aktif masyarakat yang optimal dan secara berangsur-angsur dapat menumbuhkan kesadaran warga setempat akan keberadaan dan manfaat Unit Wisata Banjaran mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam program pendampingan restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata ini, ditargetkan dapat terbentuk sebuah pedoman mengenai sistem dan tata kelola wisata yang utuh dan baik serta mampu menjadi solusi atas tantangan

pemberdayaan desa di Unit Wisata Banjaran. Pedoman yang berhasil tersusun, dapat dijadikan sebagai rujukan dan dasar bagi BUMDes Guwosari Maju Sejahtera maupun warga setempat dalam upaya revitalisasi Unit Wisata Banjaran Kabupaten Bantul di waktu yang akan datang. Selain itu, sesuai Anggaran Dasar BUMDes Guwosari Maju Sejahtera yang tercantum dalam Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2021 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa Guwosari Maju Sejahtera, Unit Wisata Banjaran diselenggarakan sebagai salah satu unit usaha BUMDes Guwosari Maju Sejahtera yang dijalankan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sehingga sudah sepatutnya restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata dilakukan agar Unit Wisata Banjaran dapat beroperasi kembali sebagaimana mestinya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun solusi konseptual yang ditawarkan dalam proses restrukturisasi adalah penerapan pendekatan desa wisata dalam sistem dan tata kelola Unit Wisata Banjaran. Berdasarkan potensi dan kearifan yang dimiliki, Unit Wisata Banjaran dinilai dapat dikembangkan melalui pendekatan Desa Wisata. Wirdayanti et al. (2021) menyampaikan bahwa melalui pendekatan desa wisata sebagai alternatif pilihan dalam pengembangan pariwisata, desa akan mendapatkan dukungan sebagai dampak adanya perubahan tren pariwisata massal menjadi wisata alternatif yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan *Organization for Economic Cooperation and Development* dalam menjawab tren pariwisata di Indonesia yang menyebutkan bahwa wisata yang berorientasi alam atau budaya lokal serta menawarkan pengalaman langsung kepada wisatawan seperti wisata pedesaan akan menjadi Megatren Pariwisata yang akan membentuk Pariwisata Masa Depan.

Pada tahun 2018, sektor pariwisata pernah menjadi andalan devisa negara, dimana pada tahun tersebut kontribusinya terhadap devisa mencapai lebih USD 19,2 miliar. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami peningkatan pada tahun 2019 yakni sebesar 4,8% atau meningkat sebesar 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Laporan *The Travel & Tourism Competitiveness Report* yang dirilis (*World Economic Forum*) WEF (2019), daya saing sektor ini juga mengalami kemajuan di tahun 2019, sektor pariwisata Indonesia berada pada posisi peringkat 40, dimana sebelumnya berada pada peringkat 42 di tahun 2017 (*World Economic Forum*, 2019). Sesuai dengan informasi Visi Indonesia 2045, sektor pariwisata Indonesia akan terus diperhatikan bahkan diproyeksikan akan menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi tersebut didukung dengan proyeksi jumlah wisatawan mancanegara yang meningkat pada tahun 2045 hingga mencapai 73,6 juta wisatawan (Bappenas, 2019). Dengan begitu, besarnya peran sektor pariwisata bagi perekonomian nasional dan besarnya dukungan terhadap

sektor pariwisata di masa depan, pendekatan desa wisata dalam restrukturisasi sistem dan tata kelola dinilai layak diterapkan guna mendukung revitalisasi Unit Wisata Banjaran.

Solusi konseptual selanjutnya yang ditawarkan kepada mitra adalah restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata melalui penerapan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai upaya optimalisasi peran masyarakat dalam pengembangan desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan (Syaifudin & Ma'ruf, 2022). CBT mampu menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam konsep pembangunan yang berorientasi pada masyarakat karena menurut Ahsani et al. (2018), aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya merupakan tiga aspek yang turut diperhitungkan dalam CBT. Melalui tiga orientasi tersebut, aspek keuangan bukan lagi menjadi aspek satu-satunya yang dipertimbangkan oleh pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dalam konsep CBT kegiatan pembangunan pariwisata sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat, seluruh ide kegiatan, strategi pariwisata, proses pengembangan produk dan jasa pariwisata, sampai dengan manfaatnya dihasilkan dan dirasakan atas keterlibatan masyarakat secara partisipatif (Ahsani et al., 2018; Wahyuni, 2018). Dengan begitu, melalui penerapan CBT yang optimal, masyarakat tidak lagi menjadi pelaku wisata yang pasif dan dapat merasakan manfaatnya.

Secara menyeluruh, pengabdian melalui program pendampingan restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata ini dilakukan dengan tujuan utama sebagai tawaran solusi implementatif yang mampu mengidentifikasi, menemukan dan merumuskan sebuah pedoman sebagai luaran akhir program terkait sistem dan tata kelola wisata yang dapat diterima dan diterapkan oleh seluruh lapisan masyarakat serta mampu menjadi solusi atas berbagai tantangan dalam pemberdayaan desa terutama Unit Wisata Banjaran sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dan dasar bagi BUMDes Guwosari Maju Sejahtera maupun warga setempat dalam upaya revitalisasi Unit Wisata Banjaran Kabupaten Bantul di waktu yang akan datang.

B. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat dilaksanakan di 3 (tiga) padukuhan Kawasan Banjaran di antaranya: Watugedug, Kentolan Lor, dan Kembang Putihah pada tanggal 10 Oktober sampai dengan 22 Desember 2022 melalui program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) *Matching Fund* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma Ata Yogyakarta 2022.

Sasaran program pendampingan adalah warga yang terlibat langsung sebagai pengelola Unit Wisata Banjaran yang di antaranya 3 orang kepala dukuh, 2 orang warga pengelola terdahulu, 4 orang warga pengelola berjalan serta 3 orang pihak dari BUMDes Guwosari Maju Sejahtera sehingga dalam hal ini peserta pendampingan sejumlah 12 orang. "Pendampingan Restrukturisasi Sistem dan Tata Kelola Wisata" menjadi salah satu program

utama dalam program pengabdian yang berorientasi pada pengembangan wisata Kawasan Banjaran, Unit Wisata Banjaran ini. Pendampingan dilakukan melalui bentuk perhatian, penyampaian pesan, memberikan dorongan serta motivasi, mengajak, mengemukakan ide maupun solusi, memberikan layanan dan bantuan, menasehati, merujuk serta berkolaborasi secara bersama-sama. Adapun dalam pengabdian ini, pendampingan dilakukan dengan melakukan analisis kondisi, latar belakang, dan masalah yang ada pada Unit Wisata Banjaran untuk selanjutnya dirumuskan luaran pedoman restrukturisasi sistem dan tata kelola Unit Wisata Banjaran sebagai rekomendasi alternatif solusi secara musyawarah melalui *Focus Group Discussion* (FGD) untuk proses pengumpulan data terkait permasalahan tertentu melalui diskusi yang intensif bersama berbagai lapisan masyarakat serta pihak pengelola. Terdapat 4 tahapan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu tahap persiapan dan perencanaan (pra-kegiatan), implementasi awal, monitoring dan evaluasi, serta implementasi lanjutan-akhir yang tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1. Peta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Minggu ke-												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Persiapan dan Perencanaan (Pra-Kegiatan)													
	Survei Pendahuluan		■											
	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Perencanaan Keseluruhan Program			■										
2	Tahap Implementasi Awal													
	Mini riset sistem dan tata kelola Unit Wisata Banjaran				■	■								
	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Perumusan Konsep Pengembangan						■	■	■					
	Musyawarah Terbuka melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)								■					
3	Tahap Monitoring dan Evaluasi												■	
4	Tahap Implementasi Lanjutan-Akhir													■

Pada tahap persiapan dan perencanaan (pra-kegiatan) dilakukan survei pendahuluan melalui wawancara secara langsung kepada beberapa pihak terkait, di antaranya: carik Kalurahan Guwosari, kepala dukuh setempat, pengelola terdahulu, pihak BUMDes Guwosari Maju Sejahtera serta beberapa sampel warga setempat. Survei pendahuluan dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan (Sinaga et al., 2017). Survei ini dilakukan untuk melihat dan menggali informasi serta data agar tim pengabdian dapat lebih dalam mengenali Unit Wisata Banjaran untuk mendukung proses pendampingan nantinya.

Tahapan berikutnya ialah implementasi awal, yaitu dengan menindaklanjuti rencana yang telah tersusun secara komprehensif, dengan menyelenggarakan beberapa tahap FGD dengan melakukan Musyawarah Terbuka yang diadakan secara massal sebagai puncak kegiatan FGD. Pada masing-masing tahapan FGD dilakukan pembahasan mengenai rekomendasi restrukturisasi sistem dan tata kelola secara berkesinambungan, kelebihan dan kekurangan masing-masing konsep, serta bagaimana konsep tersebut diterapkan. Adapun tawaran solusi konseptual yang menjadi topik pembahasan dalam beberapa tahap FGD antara lain restrukturisasi sistem dan tata kelola melalui penerapan pendekatan desa wisata, penerapan *Community Based Tourism* (CBT), serta penerapan *Corporate Social Responsibility* guna mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan penerapan 5 Pilar Aksi G20 “The Bali Guidelines” sebagai basis dukungan dalam upaya restrukturisasi sistem dan tata kelola.

Evaluasi dilakukan dengan menetapkan empat indikator utama keberhasilan program sebelum program dijalankan yakni: (1) menemukan *history* dan latar belakang masalah yang terjadi pada Unit Wisata Banjaran; (2) tersusunnya sistem dan tata kelola wisata Unit Wisata Banjaran yang tepat sesuai ikhtisar permasalahan yang ditemukan serta sesuai dengan yang diharapkan dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) pelibatan langsung mitra dalam perumusan sekaligus penerimaan pemahaman mitra terhadap berbagai konsep dalam restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata Unit Wisata Banjaran; dan (4) tersusunnya buku pedoman restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata Unit Wisata Banjaran. Sehingga, pada tahap monitoring dan evaluasi, seluruh implementasi rencana dan pelaksanaan FGD termasuk juga hasil kerja dan usulan yang tersusun dimonitoring untuk disesuaikan kembali. Selain itu, evaluasi dilakukan dengan melakukan wawancara langsung terhadap peserta pendampingan untuk menentukan tingkat keberhasilan program pendampingan dengan mengacu pada indikator keberhasilan yang ditetapkan. Pada tahap implementasi lanjutan-akhir, seluruh rencana alternatif yang telah disiapkan pada tahap monitoring diimplementasikan sebagaimana mestinya, termasuk di antaranya adalah penyusunan akhir pedoman restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata Unit Wisata Banjaran sehingga diperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan atas program pengabdian masyarakat ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan (Pra-Kegiatan)

Survei pendahuluan dilakukan dalam 3 tahapan menyesuaikan dengan ketersediaan waktu yang ditawarkan oleh masing-masing pihak narasumber. Pada tahapan ini, kuantitas informasi lebih banyak diperoleh ketika survei dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak pengelola terdahulu,

yakni pihak pengelola pertama sekaligus perintis Unit Wisata Banjaran, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Dokumentasi proses wawancara kepada pengelola terdahulu (pengelola pertama Unit Wisata Banjaran).

Melalui tahapan ini, diperoleh beberapa informasi di antaranya:

a. Profil Unit Wisata Banjaran

Unit Wisata Banjaran didirikan pada akhir tahun 2019, dan mulai beroperasi pada tahun 2020. Pengelola utama dari Unit Wisata Banjaran adalah BUMDes Guwosari Maju Sejahtera sehingga manajemen tata kelola menjadi kewenangan BUMDes Guwosari Maju Sejahtera dengan tetap melibatkan warga sekitar. Unit Wisata Banjaran didirikan sebagai wisata pendukung Goa Selarong yang berkonsep “Wisata Edukasi, Sejarah, dan Budaya”. Kawasan Banjaran memiliki potensi sejarah dan budaya dengan riwayat sejarah yang cukup kental akan perjuangan Pangeran Diponegoro. Potensi karya kreatif yang dimiliki cukup spesifik yakni pada bidang kerajinan kayu. Selain itu, potensi alam dan budaya Kawasan Banjaran masih terjaga kearifannya. Adapun berbagai temuan potensi tersebut, di antaranya: (1) Potensi UMKM Kerajinan dan Pertanian: Hasto Aji Craft, Lampah Berkah Furniture, Putra Pantura/Bandar Kayu, Castella Home Décor, Rupa-rupa Lapak, Seni Kerajinan Sanggar Diponegori, dan Selarong Indah Souvenir serta UMKM Pertanian Pak Plenthong; (2) Potensi Kesenian dan Budaya: Kreator Lukis “Pak Widodo”, Kreator Lukis “Ernantaitem” dan Jathilan Watugedug; (3) Potensi Alam: Bukit Semanggir dan Goa Selarong; dan (4) Potensi Kuliner dan Home Industri: Catering Dua Kualo dan Keripik Gembus.

b. Latar Belakang Masalah Unit Wisata Banjaran

Selama tiga bulan beroperasi dengan mengandalkan Warung Banjaran dan beberapa fasilitas pendukung yang masih terbatas, Unit Wisata Banjaran mampu mendatangkan wisatawan dengan kuantitas yang tergolong cukup ramai, bahkan dapat mencapai laba bersih sekitar 3 juta selama masa operasional tersebut. Awal beroperasi, Unit Wisata Banjaran secara umum dikelola oleh warga dengan

mengutamakan partisipasi masyarakat dengan tetap memperhatikan pertimbangan BUMDes. Kendala bermula ketika pergantian kepengurusan BUMDes, yang disinyalir dalam melaksanakan penyelenggaraan unit wisata tidak lagi sesuai harapan warga dan tidak lagi mengutamakan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang seharusnya menjadi pelaku utama dan menjadi bagian yang tidak dapat ditinggalkan dalam berbagai tahapan pengelolaan Unit Wisata Banjaran tidak lagi terbentuk koordinasi yang baik dengan pihak pengelola (BUMDes). Peninjauan unit usaha oleh pihak pengelola tidak lagi dilakukan secara optimal. Dalam rangkaian wawancara kepada salah satu warga ditemukan argumen bahwa beberapa warga setempat telah nyaman dengan kegiatan masing-masing, sehingga tidak lagi ikut campur dalam pengelolaan Unit Wisata Banjaran. Akibatnya, Unit Wisata Banjaran tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki Unit Wisata Banjaran menjadi tidak terawat dengan baik.

Adapun tahap perencanaan dilakukan dengan penyusunan rencana-rencana strategis guna menindaklanjuti hasil yang diperoleh dari tahap persiapan untuk selanjutnya dilakukan koordinasi lanjutan bersama objek pendampingan. Presentasi rencana-rencana strategis program pengabdian dilakukan oleh tim pengabdian kepada pihak mitra dengan melibatkan perwakilan seluruh kelompok dalam kegiatan KKN-T Universitas Alma Ata dengan tujuan agar antar program masing-masing kelompok pengabdian memiliki kesinambungan. Sebagian besar mitra menyatakan persetujuan atas rencana yang telah disusun bahkan siap mendukung terlaksananya program. Menurut informasi dari salah satu peserta pendampingan, pengabdian sejenis ini baru pertama kali diselenggarakan di Unit Wisata Banjaran, seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Dokumentasi proses presentasi tim pengabdian kepada mitra dan perwakilan Kelompok 1-6 KKN-T atas rumusan perencanaan program pendampingan yang akan dilakukan

Adapun beberapa rencana yang tersusun dan berhasil disepakati guna antara lain:

- a. Melakukan mini riset sistem dan tata kelola yang ideal bagi Unit Wisata Banjaran kepada masyarakat umum secara luas.
- b. Merumuskan konsep pengembangan serta sistem dan tata kelola Unit Wisata Banjaran (sementara) secara bertahap.
- c. Menyelenggarakan Musyawarah Terbuka melalui *Focus Group Discussion Group* (FGD) bersama beberapa lapisan masyarakat setempat guna membahas konsep pengembangan serta sistem dan tata kelola Unit Wisata Banjaran (sementara) secara lebih lanjut, sehingga diperoleh konsep pengembangan serta sistem dan tata kelola Unit Wisata Banjaran yang sesuai dengan harapan berbagai lapisan masyarakat.

2. Tahap Implementasi Awal

- a. Mini Riset Sistem dan Tata Kelola yang Ideal bagi Unit Wisata Banjaran kepada Masyarakat Umum secara Luas.

Kuesioner didistribusikan kepada masyarakat luas baik warga setempat maupun masyarakat selain warga Kawasan Banjaran. Selama tiga hari beredar, diperoleh 74 responden yang terlibat dalam kuesioner tersebut. Setelah dinilai dan diperhitungkan diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas responden menyatakan “Setuju” atas pilihan kuesioner yang tersaji dalam skala linkert. Adapun kesimpulan yang dimaksud adalah persetujuan atas penerapan 5 Pilar Aksi G20 yang tercantum dalam rumusan “*The Bali Guidelines*” pada rangkaian *1st Tourism Working Group* (TWG) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan telah disepakati sebagai bentuk dukungan G20 dalam upaya pemulihan global pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) (Henry, 2022). Kelima pilar tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pilar Pertama: Sumber Daya Manusia terkait Pekerjaan, Bakat dan Edukasi; (2) Pilar Kedua: Inovasi, Digitalisasi dan Ekonomi Kreatif; (3) Pilar Ketiga: Pemberdayaan Perempuan dan Generasi Muda; (4) Pilar Keempat: Perlindungan Iklim, Konservasi, Biodiversitas, dan Ekonomi Sirkular; dan (5) Pilar Kelima: kerangka kebijakan, Tata Kelola dan investasi.

Kelima pilar ini turut direkomendasikan sebagai salah satu basis yang diterapkan dalam restrukturisasi sistem dan tata kelola karena dapat menjadi konsep pendukung restrukturisasi sistem dan tata kelola yang sesuai dengan perkembangan dan cita-cita G20 dalam upaya pemulihan global pada sektor pariwisata.

- b. Perumusan Konsep Pengembangan Serta Sistem dan Tata Kelola Unit Wisata Banjaran (Sementara)

Perumusan dilakukan dengan melibatkan seluruh peserta pendampingan secara bergantian maupun massal dengan maksud

peserta dapat langsung memahami akan konsep pengembangan yang dirumuskan dan akan diterapkan di Unit Wisata Banjaran. Selain itu, dengan pelibatan langsung memberikan kesempatan bagi peserta pendampingan untuk menyampaikan argumentasi jika terdapat masukan atau koreksi terhadap konsep yang dirumuskan, seperti terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Dokumentasi perumusan konsep pengembangan serta restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata bersama pihak BUMDes

Berdasarkan beberapa kajian teori yang dilakukan tim pengabdian bersama peserta pendampingan melalui FDG secara bertahap, diperoleh rekomendasi konsep pengembangan serta sistem dan tata kelola Unit Wisata Banjaran (sementara), sebagai berikut:

1) Penerapan Pendekatan Desa Wisata pada Unit Wisata Banjaran

Orientasi pengembangan desa wisata yang berpusat pada wisata alam dan budaya lokal dinilai tepat untuk diterapkan sebagai pendekatan dalam upaya revitalisasi Unit Wisata Banjaran guna mengoptimalkan pemberdayaan berbagai potensi yang dimiliki oleh Kawasan Banjaran (Wirdayanti et al., 2021). Sesuai dengan definisinya, Wirdayanti et al., (2021) mendefinisikan Desa wisata (Kampung, Nagari, Gampong, atau sebutan lainnya) sebagai sebuah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas yaitu merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat di perdesaan dengan segala potensinya. Sehingga, yang menjadi daya tarik desa wisata bagi wisatawan adalah keragaman budaya, keunikan alam, dan karya kreatif yang dimiliki sebuah desa. Dengan begitu, melalui pendekatan desa wisata, (a) aktivitas sehari-hari masyarakat Kawasan Banjaran tidak akan tergantikan dan terganggu secara signifikan; (b) potensi yang dimiliki Kawasan Banjaran akan berpeluang untuk dapat dimanfaatkan atau diberdayakan secara optimal, dimana potensi dan keunikan daya tarik yang dimiliki Kawasan Banjaran akan menjadi bagian atraksi-atraksi yang ditawarkan kepada wisatawan. (c) kearifan lokal Kawasan Banjaran secara tidak langsung akan terus dilestarikan; serta (d) dapat memberikan stimulus

keberlanjutan pariwisata bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat di masa mendatang.

Penerapan pendekatan Desa Wisata yang tepat mampu menjamin terciptanya kesejahteraan masyarakat, karena sesuai kebijakan pemerintah pariwisata pedesaan diperkirakan akan menjadi role model pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sari & Nabella, 2021). Selain itu, melalui pendekatan desa wisata juga mampu mendorong BUMDES dalam upaya pemberdayaan desa, seperti halnya di Desa Lombok Kulon, melalui pengembangan Desa Wisata Organik telah mampu membuat masyarakat berdaya dan lebih aktif dalam memberdayakan potensi sekitar (Indrianti et al., 2019).

- 2) Revitalisasi Unit Wisata Banjaran melalui Paradigma Baru Pariwisata Berbasis Masyarakat, *Community Based Tourism* (CBT) Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan potensi lokal menjadi salah satu bentuk pengembangan pariwisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Wirdayanti et al., 2021). Seperti yang sudah diungkapkan Wahyuni (2018) melalui paradig baru pariwisata berbasis masyarakat, partisipasi masyarakat mencakup keseluruhan proses perencanaan hingga proses evaluasi terhadap perubahan yang terjadi. Masyarakat memiliki andil dan berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan dalam pengelolaan pariwisata. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai bentuk baik nyata seperti tenaga, uang, dan harta benda maupun dalam bentuk partisipasi tidak nyata berupa ide/gagasan, kritik, dan saran (Ulum & Dewi, 2021). Hal ini mampu menjadi solusi masalah yang terjadi dalam pengelolaan Unit Wisata Banjaran, dimana masyarakat merasa kurang dilibatkan dalam proses pengembangan Unit Wisata Banjaran. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang tidak mengetahui arah dan rencana pengembangan dan pembangunan Unit Wisata Banjaran.

Rekomendasi penerapan *Community Based Tourism* dikuatkan oleh hasil temuan Krismawintari Dyah & Rai Utama (2019) yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan, jika masyarakat lokal berpartisipasi langsung dalam pengelolaan pariwisata, seperti halnya pengelolaan Daya Tarik Wisata Jatiluwih yang diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat Desa Jatiluwih sehingga berbagai pengelolaan yang dilakukan mampu memberikan manfaat yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Penerapan CBT memberkan manfaat dan dampak positif pada aspek ekonomi dan sosial seperti terciptanya lapangan pekerjaan, adanya pendapatan baru bagi masyarakat, peningkatan kualitas hidup, peningkatan kebanggaan pada komunitas, dan kesediaan serta kesetiaan masyarakat untuk terlibat dalam tiap kegiatan di

Desa Wisata Kebon Ayu sehingga pengembangan Desa Wisata dapat berkelanjutan (Yanti Utami et al., 2022). Pada temuan lain, dalam penelitian yang dilakukan di Desa Kepuhsari, penerapan CBT juga mampu menekan arus urbanisasi, dengan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat sebagai operator pariwisata, penyedia jasa, maupun karyawan dari pengrajin (Anandito & Setiawan, 2018).

Pada penelitian obyek wisata Sumber Biru, ditemukan bahwa penerapan CBT dapat berkembang karena adanya kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab dari penggiat lingkungan dan masyarakat (Triristina & Pujiyanti, 2022). Untuk itu, bentuk partisipasi masyarakat dapat dihimpun melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Seperti yang dinyatakan F S Putra et al. (2022), pengelolaan dan pemberdayaan SDM yang terlaksana dengan baik melalui *Community Based Tourism* (CBT) dengan adanya Pokdarwis (kelompok sadar wisata) dan Pokja (kelompok kerja) yang terbentuk didalamnya memberikan hasil yang sangat baik dan potensial untuk kesejahteraan masyarakat desa yang lebih mandiri, kreatif, inovatif, dan dapat meningkatkan pendapatan dalam arti lain dapat meningkatkan perekonomian desa dan masyarakatnya. Untuk mensukseskannya, pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan baik infrastruktur dan suprastruktur harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat (Mukmin et al., 2018). Pemerintah desa seharusnya tidak menjadi satu-satunya aktor dalam proses pengembangan desa wisata (Andayani et al., 2017). Basis CBT dan pemberdayaan Pokdarwis ini dinilai sesuai untuk diterapkan sebagai solusi untuk dapat memaksimalkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Unit Wisata Banjaran. Oleh karena masyarakat telah memiliki daya atau kemampuan, maka kemandirian masyarakat dapat diwujudkan, sehingga kesejahteraannya mampu ditingkatkan (Winata & Idajati, 2020).

3) Revitalisasi Unit Wisata Banjaran melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan.

Tujuan utama pembangunan pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat nilai-nilai budaya masyarakat dan menambah nilai perekonomian masyarakat (Wirdayanti et al., 2021). Unit Wisata Banjaran sebagai salah satu unit usaha dari BUMDes, juga harus berpijak pada *triple bottom lines*, yang terdiri dari kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup untuk menjamin pertumbuhan nilai perusahaan secara berkelanjutan atau *Sustainable* (Iskandar, 2016). *Profit* (keuntungan), *people*

(masyarakat), *planet* (lingkungan) merupakan bentuk alternatif *Corporate Social Responsibility* atau pertanggungjawaban sosial perusahaan berdasarkan pada konsep *triple bottom line* (Marnelly, 2012). Melalui penerapan CSR dapat menumbuhkan citra baik di mata masyarakat, memudahkan akses modal tambahan pihak ketiga, serta terbentuk SDM berkualitas. Dengan begitu, melalui penerapan CSR dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Unit Wisata Banjaran.

c. Musyawarah Terbuka bersama Beberapa Lapisan Masyarakat Setempat

Musyawarah Terbuka diselenggarakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di Unit Wisata Banjaran pada tanggal 22 Oktober 2022 dan diikuti oleh sekitar 32 peserta dari masyarakat dimana 12 peserta di antaranya merupakan peserta pendampingan yang sebelumnya telah ditetapkan. Pada FGD ini, konsep pengembangan serta sistem dan tata kelola wisata (sementara) dipresentasikan kepada masyarakat secara lebih luas agar kemudian masyarakat memiliki pandangan lebih mengenai keberadaan Unit Wisata Banjaran yang cukup potensial, seperti terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Dokumentasi Musyawarah Terbuka

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dimulai dengan mengadakan koordinasi massal yang diikuti oleh seluruh perwakilan kelompok KKN-T, pihak Pemerintah Kelurahan, Tim *Matching Fund* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Alma Ata serta 12 orang peserta pendampingan. Koordinasi massal diselenggarakan di Unit Wisata Banjaran pada tanggal 25 November 2022.

Hasil evaluasi yang dilakukan dengan wawancara menyatakan bahwa hampir 99% sasaran pengabdian mengungkapkan persetujuan atas rekomendasi konsep yang telah tersusun dalam pedoman restrukturisasi sistem dan tata kelola Unit Wisata Banjaran. Persetujuan tersebut diiringi beberapa catatan dari para peserta pengabdian yang salah satunya pihak

pengelola akan melakukan kajian lebih lanjut mengenai rekomendasi yang diusulkan agar dapat lebih sesuai dengan Unit Wisata Banjaran. Selain itu, beberapa peserta pendampingan merekomendasikan untuk dilakukan pengabdian lanjutan agar dapat kebersamai dalam implementasi penerapan rekomendasi restrukturisasi sistem dan tata kelola Unit Wisata Banjaran yang telah terbentuk. Oleh karena itu, peserta pendampingan masih sangat memerlukan pendampingan dengan berkelanjutan.

4. Tahap Implementasi Lanjutan-Akhir

Dalam tahapan ini, guna menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan, berbagai temuan yang diperoleh selama program pendampingan disajikan dalam sebuah buku “Restrukturisasi Sistem dan Tata Kelola Unit Wisata Banjaran” yang kemudian dapat dijadikan rujukan dan dasar bagi BUMDes maupun warga setempat dalam upaya revitalisasi Unit Wisata Banjaran Kabupaten Bantul, seperti terlihat pada Gambar 5.



Gambar 3. Sampul Buku “Restrukturisasi Sistem dan Tata Kelola Unit Wisata Banjaran”

D. SIMPULAN DAN SARAN

Unit Wisata Banjaran merupakan salah satu unit usaha BUMDes Guwosari Maju Sejahtera, yang dikelola untuk memberikan kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya sehingga sudah selayaknya restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata dilakukan. Berdasarkan potensi dan kearifan yang dimiliki, Unit Wisata Banjaran dinilai dapat dikembangkan melalui pendekatan Desa Wisata. Melalui penerapan *Community Based Tourism* (CBT), kegiatan pembangunan pariwisata akan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat dapat lebih optimal. Guna mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Unit Wisata Banjaran, *Corporate Social Responsibility* dapat diterapkan karena kondisi finansial saja tidak cukup untuk menjamin pertumbuhan nilai perusahaan secara berkelanjutan atau *Sustainable*.

Selain itu, kelima pilar “G20 Bali Guideline” turut direkomendasikan untuk memandu dalam upaya mendorong pemulihan pariwisata dunia dan menjadikan pariwisata lebih inklusif juga tangguh. Melalui program pendampingan restrukturisasi sistem dan tata kelola wisata ini, diperoleh rumusan rekomendasi restrukturisasi sistem dan tata kelola yang termuat dalam buku cetakan 1 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Samudera Biru berjudul “Restrukturisasi Sistem dan Tata Kelola Unit Wisata Banjaran”, dimana hampir 99% peserta pendampingan mengungkapkan persetujuan atas rekomendasi konsep yang telah tersusun dalam pedoman restrukturisasi sistem dan tata kelola Unit Wisata Banjaran. Dengan demikian, buku tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan dan dasar bagi BUM Desa Guwosari Maju Sejahtera maupun warga setempat dalam upaya revitalisasi Unit Wisata Banjaran Kabupaten Bantul di waktu yang akan datang. Adapun berdasarkan evaluasi indikator keberhasilan, prosentase menunjukkan hampir 99% indikator telah tercapai. Penilaian tidak dapat disimpulkan tercapai optimal (100%) karena masih ada pertimbangan lebih lanjut dari pihak BUMDes dalam adopsi rekomendasi yang telah diusulkan.

Dapat dilakukan pengabdian lanjutan yang mampu melanjutkan implementasi berbagai rencana restrukturisasi sistem dan tata kelola yang tercantum dalam buku yang telah tersedia serta dapat lebih mengoptimalkan sistem dan tata kelola wisata agar dapat terbentuk secara utuh dan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Kemendikbud yang telah memberikan kesempatan hibah untuk kegiatan Matching Fund 2022, kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma Ata sebagai tim pelaksana kegiatan KKN-T Matching Fund sehingga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik serta terimakasih kepada seluruh mitra kegiatan (1) Pamong Kalurahan Guwosari; dan (2) warga masyarakat yang berada di sekitar wilayah kawasan wisata unit Banjaran yang telah bersedia berkolaborasi dalam kegiatan ini. Selanjutnya kami juga berterimakasih kepada Universitas Alma Ata Yogyakarta yang telah memberikan izin, dukungan dan fasilitas dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Admaja, T. K., Anggraini, O., & Suwarjo. (2020). *Desa Wisata Pentingsari; Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata*. 2(September), 33–46.
- Ahsani, R. D. P., Suyaningsih, O., Ma'rifah, N., & Aerani, E. (2018). Penerapan konsep community based tourism (CBT) di desa wisata candirejo borobudur mewujudkan kemandirian desa. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 135–146. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2270>
- Anandito, E. S., & Setiawan, B. (2018). Dampak Ekonomi Penerapan Community Based Tourism di Desa Wisata Wayang, Kepuhsari, Kecamatan Manyaran

- Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 23(2), 84–96. <http://jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id/index.php/JIP/article/view/1195>
- Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>
- Bappenas. (2019). Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur. *Bappenas.Go.Id*. https://www.bappenas.go.id/files/Visi Indonesia 2045/Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045_Final.pdf
- F S Putra, F. I., Aqmala, D., Haziroh, A. L., & Artikel, I. (2022). SENAMA Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen*, 1–18.
- Habibi, M. M. (2022). Sinergi Peran Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 429. <https://doi.org/10.17977/um019v7i2p429-437>
- Henry. (2022). *Apa Itu Bali Guideline Hasil Rumusan Para Menteri Pariwisata G20?* Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5081334/apa-itu-bali-guideline-hasil-rumusan-para-menteri-pariwisata-g20>
- Herdiana, D. (2019). Dsa Wisata Berbasis Masyarakat. *Jumpa*, 6(1), 63–86.
- Ignasius, & Susilowati, L. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pengembangan Desa Wisata Kemetul. *Kritis*, 29(1), 37–51. <https://doi.org/10.24246/kritis.v29i1p37-51>
- Indrianti, D. T., Ariefianto, L., & Halimi, D. (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Desa Wisata Organik di Kabupaten Bondowoso. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 3(1), 13–18. <https://doi.org/10.15294/pls.v3i1.31001>
- Iskandar. (2016). Pengaruh Penerapan Customer Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Forum Ekonomi*, 18(1), 76–84.
- Istiyanti, D. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening (Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village). *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(1), 53–62.
- Krismawintari Dyah, N. P., & Rai Utama, I. G. B. (2019). Kajian tentang Penerapan Community Based Tourism di Daya Tarik Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 9(2), 429. <https://doi.org/10.24843/jkb.2019.v09.i02.p08>
- Marnelly, T. R. (2012). Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 3(1), 49–59.
- Mukmin, Z., Ruslan, R., & Kurniati, S. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 106–111. <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p106>
- Mulyani, Y., Mahfud, T., Winnarko, H., Gafur, A., Rustika, R., & Nurdin, I. (2021). Penguatan Kelembagaan Dan Tata Kelola Pengurus Desa Wisata Teritip. *Jurnal Abdimas Terapan*, 1(1), 22–27. <https://doi.org/10.56190/jat.v1i1.5>
- Rachman, A. F., Suprina, R., Tinggi, S., & Trisakti, P. (2019). Pendampingan Desa Cipasung Menuju Desa Wisata. *Jurnal Pemberdayaan Pariwisata*, 1(1), 2019.
- Ristiana, & Yusuf, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 6(1), 91. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v6i1.4250>
- Rozaki, A., & Rohaya, S. (2019). Memberdayakan Desa Melalui Pariwisata Berbasis BUMDES: Studi Interkoneksi BUMDES Melalui Integrated Information System di Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta. *Engagement: Jurnal*

- Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–20.
<http://engagement.fkdp.or.id/index.php/engagement/article/view/46>
- Sari, K., & Nabella, R. S. (2021). Potensi Lokal dan Pengembangan Desa Wisata Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES): Studi Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 109–114. <http://conference.um.ac.id/index.php/esp/article/view/596>
- Sinaga, J. B., Manurung, S., & Marpaung, J. E. (2017). Bimbingan Belajar Bahasa Inggris Untuk Anak Usia Dini Di Kelurahan Buliang Rw 18. *Minda Baharu*, 1(1), 33–41. <https://doi.org/10.33373/jmb.v1i1.1171>
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi di Desa Jurug Kabupaten Ponorogo)*. 10(2), 17–30.
- Triristina, N., & Pujiyanti, Y. R. (2022). *Penerapan Community Based Tourism (Cbt) Berbasis Modal Sosial*. 13(1), 1–21.
- Ulum, S., & Dewi, S. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP)*, 3(1), 14–24. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v3i1.1408>
- Utami, T. R., Safrianti, S., Pardiansyah, D., & Yulfiperius. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata Berbasis Pendampingan: Desa Wisata Sumber Urip, Bengkulu. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 79–86.
- Wahyuni, D. (2018). Strategi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Aspirasi, Vol. 09 No*(Jurnal Masalah-Masalah Sosia), 83.
- Winata, I. P. J., & Idajati, H. (2020). Karakteristik Desa Berdasarkan Kriteria Community Based Tourism di Desa Wisata Kamasan, Kabupaten Klungkung. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2), 194–199. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.48910>
- Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B. D., Hartoyo, D. R., Indarti, E., Gautama, H., S, H. E., Harefa, K., Minsia, M., Rumayar, M., Indrijatiningrum, M., Susanti, T., & Ariani, V. (2021). *Pedoman Desa Wisata*. 1 s.d 96. <https://www.ciptadesa.com/2021/06/pedoman-desa-wisata.html>
- World Economic Forum. (2019). *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 [El Informe de Competitividad de Viajes y Turismo 2019]*. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf
- Yanti Utami, V., Yulianah, S., Yusuf, M., Mashuri, J., Tinggi, S., Administrasi, I., & Korespondensi Penulis, M. (2022). Penerapan Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat. *TheJournalish: Social and Government*, 3(3), 219–226. <http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/286>